

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Literasi masyarakat marjinal masih menjadi tantangan besar dalam misi penyebaran akses informasi secara merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Di wilayah perkotaan, khususnya di kawasan Blok M yang sudah tersedia banyak perpustakaan sebagai sumber dan penyedia informasi, tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kesenjangan akses informasi yang dialami masyarakat marjinal, baik dalam memperoleh, menggunakan, maupun mempercayai informasi. Selain itu, tidak semua perpustakaan mampu menjembatani kebutuhan informasi kelompok masyarakat tersebut.

Selain keterbatasan akses informasi, sebagian masyarakat marjinal juga mengalami hambatan sosial-psikologis dalam mengakses ruang literasi formal. Perpustakaan formal sering kali dipandang sebagai ruang yang kaku, eksklusif, dan prosedur administratif sehingga menimbulkan rasa sungkan, malu, dan tertolak bagi kelompok masyarakat tertentu. Kondisi ini dapat dipahami sebagai *Library Anxiety*, yaitu kondisi kecemasan atau ketidaknyamanan individu ketika berhadapan dengan ruang perpustakaan formal. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat memilih menjauh dari ruang literasi formal meskipun mereka mempunyai kebutuhan informasi. Jika kesenjangan akses informasi dan hambatan sosial-psikologis yang dirasakan oleh masyarakat marjinal seperti akses informasi dan hambatan sosial-psikologis

masyarakat marjinal terus terabaikan, bukan hanya tingkat literasi saja yang ikut menurun, tetapi juga kualitas serta kesejahteraan hidup masyarakat ikut menurun.

Dalam penelitian ini, masyarakat marjinal dipahami sebagai kelompok masyarakat perkotaan seperti pedagang kaki lima, anak penjual tisu, pekerja informal, dan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang mengalami keterbatasan akses dan hambatan sosial-psikologis dalam mengakses ruang literasi formal. Hambatan yang dirasakan oleh masyarakat marjinal muncul dalam bentuk rasa sungkan, tidak percaya diri, dan perasaan tidak diterima ketika mengakses perpustakaan formal.

Lapak baca, khususnya “Perpustakaan Jalanan Jakarta” sadar terhadap fenomena yang dirasakan oleh masyarakat marjinal di kawasan Blok M, mereka berusaha untuk menyediakan akses informasi yang selama ini belum didapatkan oleh masyarakat marjinal dengan menggelar lapak membaca di kawasan Taman Literasi Blok M, bukan hanya menyediakan buku sebagai bahan bacaan, lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” juga menjadi ruang publik yang bersifat inklusif dengan mengadakan diskusi dan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat terbuka tanpa adanya diskriminasi, yang memungkinkan untuk terjadinya interaksi sosial yang diharapkan dapat menumbuhkan modal sosial bagi masyarakat sehingga bukan hanya literasi, tetapi juga kualitas serta kesejahteraan hidup masyarakat marjinal dapat meningkat dari yang sebelumnya.

Pada era digital yang semua kegiatan komunikasi dapat dilakukan secara daring, tidak menutup kemungkinan bila masyarakat masih membutuhkan adanya

ruang publik. Ruang publik yang dapat digunakan untuk bertemu dengan individu lainnya sekadar untuk berinteraksi ataupun saling bertukar pikiran. Ruang publik merupakan ruang terbuka di luar ruangan yang dapat digunakan oleh masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok untuk menunjang kegiatan sehari-hari seperti berolahraga, rekreasi, sosialisasi dan lain-lain (Hantono & Aziza, 2020). Dengan adanya ruang publik, diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat dalam berdiskusi secara rasional dan partisipatif tanpa adanya diskriminasi dan dominasi. (Habermas, 1989).

Untuk mencapai fungsi tersebut, ruang publik perlu bersifat inklusif, yaitu terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, termasuk masyarakat marjinal yang sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap ruang literasi dan ruang pembelajaran, inklusivitas ruang publik menjadi penting karena tidak semua masyarakat merasa nyaman mengakses ruang literasi formal. Oleh karena itu, diperlukan alternatif ruang literasi yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara optimal.

Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki banyak tantangan serius dalam berbagai hal untuk terus memajukan dan mengharumkan nama bangsa, salah satunya tugas dalam meningkatkan minat dan tingkat literasi masyarakat yang telah lama menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. *Seasia* melaporkan bahwa tingkat literasi Indonesia masih menduduki peringkat keenam di Asia Tenggara dengan total skor 96.53%. Sedangkan menurut *Programme for International Student Assessment* (PISA) literasi Indonesia naik 5 peringkat dengan skor 359. Walaupun

terjadi kenaikan peringkat, skor literasi Indonesia pada tahun 2022 menjadi skor terendah yang dimiliki Indonesia sejak bergabung dengan PISA pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sulawesi Selatan menduduki urutan pertama dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tertinggi pada tahun 2023, disusul dengan DKI Jakarta pada urutan ketujuh. Hal ini jelas menunjukkan adanya masih adanya kesenjangan literasi dan akses informasi yang dirasakan masyarakat.

Selain rendahnya tingkat literasi, masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah tidak meratanya penyediaan akses informasi. BPS mencatat Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah perpustakaan terakreditasi terbanyak dengan total 3.129 perpustakaan, sedangkan provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan tidak memiliki satupun perpustakaan yang terakreditasi. Hal ini menjadi bukti bahwa penyebaran informasi di Indonesia belum merata menjangkau masyarakat. Tidak meratanya perpustakaan terakreditasi yang diharapkan menjadi agen utama penyedia informasi secara layak menciptakan kesenjangan akses informasi diberbagai daerah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholeh (2022) menunjukkan bahwa akses informasi sangat berpengaruh terhadap kemiskinan, jika akses informasi meningkat 1%, maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 21.32%, yang artinya semakin mudah dan luas akses informasi yang didapatkan individu, maka semakin besar pula peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, karena meningkatnya keberdayaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup individu tersebut. Bahkan penelitian milik Yusup

et al. (2017) menunjukkan bahwa masyarakat miskin di pedesaan mengalami fenomena “kalah cepat” dalam menerima informasi, mereka cenderung mengandalkan sumber informasi intrapersonal yang bersifat terbatas, serta minim akses terhadap sumber informasi formal. Hal ini juga turut dirasakan oleh masyarakat marjinal perkotaan, khususnya di Jakarta. Fenomena ini menjadi benang merah bahwa salah satu akar permasalahan literasi masyarakat marjinal adalah keterbatasan akses informasi. Dalam dunia Ilmu Perpustakaan dan Informasi fenomena di atas sebagai *Information Poverty* (Chatman, 1996), yaitu keterbatasan sebuah kelompok tertentu dalam memperoleh, menggunakan, atau mempercayai informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Fenomena kesenjangan informasi yang dirasakan oleh masyarakat dapat terjawab dengan menyediakan ruang partisipasi yang bersifat terbuka dan inklusif yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, berdiskusi, dan beropini secara setara tanpa dibatasi oleh status sosial. Meskipun berbagai regulasi dan upaya penyediaan perpustakaan telah dilakukan pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan formal belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang No.43 Tahun 2007 seakan melengkapi pendapat milik Chatman (1996). Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan diamanatkan menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat yang mewadahi pelestarian budaya, literasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin akses informasi dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperluas akses literasi masyarakat, salah satunya melalui penyediaan dan pengembangan perpustakaan, regulasi nasional seperti ekspansi besar-besaran mendirikan perpustakaan telah dilakukan, menurut data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta tercatat bahwa daerah Jakarta Selatan memiliki 1.084 perpustakaan atau sekitar 20,6%. Dengan perolehan angka yang cukup besar, sangat disayangkan tidak semua perpustakaan mampu menjembatani kesenjangan akses informasi yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti pada laporan Kompas (2025) yang meliput keberadaan lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” di kawasan Blok M, tim Kompas menemukan fakta bahwa masyarakat justru lebih nyaman mengakses informasi dan bacaan melalui lapak baca yang diujakan secara sederhana di area umum dibanding mendatangi perpustakaan formal.

Berbagai gerakan literasi alternatif di Jakarta hadir dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jakarta Book Hive mengembangkan konsep *public bookrack* berupa lemari buku di ruang publik yang memungkinkan masyarakat mengakses dan bertukar buku secara mandiri. *Silent Book Club* Jakarta menawarkan pengalaman membaca bersama dalam suasana hening yang menekankan aspek personal tanpa kewajiban untuk berdiskusi. Sementara itu, Klub Buku Bawah Tanah menghadirkan ruang baca dan diskusi yang lebih intim melalui pertemuan kelompok kecil dengan tema-tema tertentu. Berbeda dengan ketiga inisiatif tersebut, Perpustakaan Jalanan Jakarta tidak menunggu masyarakat datang sebagai anggota komunitas pembaca, tetapi hadir langsung di ruang publik yang sehari-hari digunakan masyarakat marjinal.

Berbeda dengan inisiatif tersebut, lapak baca "Perpustakaan Jalanan Jakarta" dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan fokus penelitian ini, yaitu literasi masyarakat marjinal dan ruang publik inklusif. Lapak baca ini secara konsisten menyelenggarakan kegiatan di ruang publik di kawasan Blok M yang menjadi titik pertemuan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang kaki lima, pekerja informal, anak-anak penjual tisu, serta masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

Selain menyediakan bahan bacaan secara gratis, lapak baca "Perpustakaan Jalanan Jakarta" juga memfasilitasi diskusi, interaksi sosial, serta pendampingan belajar membaca yang dapat diakses tanpa persyaratan administratif. Karakteristik tersebut menjadikan lapak baca "Perpustakaan Jalanan Jakarta" relevan untuk diteliti karena tidak hanya menyediakan alternatif akses literasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik inklusif yang berupaya menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini cenderung terpinggirkan dari ruang literasi formal.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perpustakaan jalanan sebagai alternatif pendidikan nonformal, penelitian yang secara khusus melihat peran perpustakaan jalanan sebagai ruang publik inklusif dalam mendukung literasi masyarakat marjinal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana lapak baca "Perpustakaan Jalanan Jakarta" berperan dalam menyediakan akses literasi, mengurangi kesenjangan literasi, membangun solidaritas sosial, serta mempertahankan keberlangsungan ruang literasi di ruang publik.

Dalam sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian literasi inklusif, ruang publik, serta dalam ranah Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Sementara dalam sisi praktis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi inspirasi dan saran bagi lembaga pemerintah, khususnya perpustakaan, hingga komunitas literasi yang lebih ramah bagi masyarakat marjinal. Dengan itu, penelitian ini dapat mengisi kekosongan studi mengenai peran perpustakaan jalanan sebagai ruang inklusif dalam meningkatkan literasi masyarakat marjinal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran ruang publik inklusif dalam literasi masyarakat marjinal di “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis peran ruang publik inklusif dalam literasi masyarakat marjinal di “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi, khususnya terkait *social inclusion in libraries* dan *information poverty*, serta menambah literatur mengenai peran perpustakaan komunitas sebagai ruang publik inklusif bagi masyarakat marjinal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga perpustakaan, dan komunitas literasi dalam mengembangkan strategi literasi yang lebih ramah, serta

memberi pemahaman bagi masyarakat umum tentang pentingnya perpustakaan jalanan sebagai alternatif akses informasi.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” sebagai ruang publik alternatif yang terbuka bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat marjinal di wilayah perkotaan. Waktu penelitian dilakukan selama lima bulan, mulai dari Desember 2025 hingga April 2026. Periode ini dipilih agar peneliti memiliki waktu yang memadai untuk melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perpustakaan jalanan, serta melakukan wawancara mendalam dengan pengelola lapak baca, relawan, dan pengguna dari kalangan marjinal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran perpustakaan jalanan sebagai ruang publik inklusif dalam menyediakan akses informasi.

1.6 Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ditetapkan beberapa batasan ilmiah sebagai berikut:

1. Ruang Publik Inklusif

Ruang publik inklusif diartikan sebagai ruang terbuka yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, yang memungkinkan partisipasi setara, serta mendukung interaksi sosial dan akses informasi, sehingga dapat meningkatkan literasi masyarakat marjinal di kawasan Blok M,

Jakarta. Yang dimaksud sebagai ruang publik dalam penelitian ini berupa lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” yang menjadi ruang terbuka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

1. Masyarakat Marjinal

Masyarakat marjinal adalah kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses serta hambatan sosial-psikologis dalam mengakses sumber informasi, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam penelitian ini masyarakat marjinal yang dimaksud adalah kelompok masyarakat perkotaan di sekitar kawasan Blok M, seperti pedagang kaki lima, anak penjual tisu, pekerja informal, perantau, serta masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap ruang literasi formal. Kelompok tersebut merupakan pengunjung yang memanfaatkan lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M.

2. Literasi

Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis, yang mencakup kemampuan dalam menemukan, memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Dalam penelitian ini literasi yang dimaksud adalah literasi masyarakat marjinal yang terbangun melalui aktivitas dan interaksi sosial di ruang publik inklusif yang difasilitasi oleh lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta”.

3. Perpustakaan Jalanan

Perpustakaan jalanan adalah perpustakaan alternatif hasil dari sebuah inisiatif komunitas yang menyediakan layanan literasi dan akses bacaan di ruang publik

secara gratis, terbuka dan non-diskriminatif, dengan memanfaatkan area umum seperti trotoar yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat marjinal. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan perpustakaan jalanan adalah lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M, yaitu komunitas literasi alternatif yang memanfaatkan ruang publik di kawasan Blok M sebagai sarana dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan literasi masyarakat marjinal, serta bukan merujuk pada lembaga perpustakaan formal sebagaimana standar perpustakaan pada umumnya.